

QUALITY ASSURANCE PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Syukri Fathudin Achmad Widodo

Yogyakarta state university

Abstrak

Penjaminan mutu bidang pendidikan adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistemik yang diperlukan untuk memberikan keyakinan (kepercayaan, kepastian, penjaminan) bahwa mutu hasil/ output (jasa) akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Fokus kegiatan penjaminan mutu adalah pada tingkat rencana (upstream) dan bukan pada output (downstream). Artikel ini mengupas penjaminan mutu di dua negara serumpun, yang memiliki kemiripan kultur yakni Indonesia dan Malaysia.

Pendahuluan

Mutu adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, kepuasan pelanggan yang dalam pendidikan dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. *Internal customer* yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar dan eksternal customer yaitu masyarakat, serta industry.

Mutu tidak berdiri sendiri artinya banyak faktor untuk mencapainya dan memelihara mutu. Dalam kaitan ini peran dan fungsi sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) sangat dibutuhkan. Yaitu sebuah bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses dan hasil atau outcome sesuai yang diharapkan oleh stake holders. (UNESCO, 2006).

Filosofi yang mendasari penjaminan mutu adalah: (1) ontologi (hakekat): mutu merupakan sasaran dinamis, (2) epistemologi (cara berfikir): mutu harus diperjuangkan secara terus menerus melalui struktur, figur, dan kultur, dan (3) aksiologi (nilai): penjaminan mutu harus meningkatkan mutu/memberikan nilai tambah, berpihak kepada dan memuaskan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.

Penjaminan mutu dilakukan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) fokus pada input dan proses, bukan pada output, (2) kontinuitas atau berkelanjutan/tidak

sporadis, (3) terencana dan sistematis, (4) pencegahan yaitu prevensi dari pada kurasi, dan (5) berurutan siklusnya (Gambar 1), mulai dari standar yang harus dicapai, upaya-upaya pencapaian standar, monitoring dan evaluasi ketercapaian standar, dan perbaikan mutu atas dasar hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar.



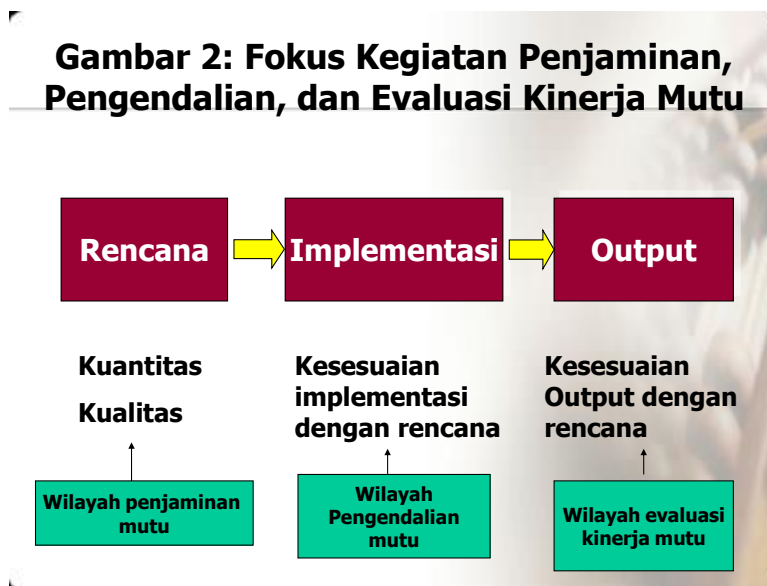
Masalah jaminan kualitas telah menjadi focus dari banyak negara untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. *Quality assurance* adalah filosofi dan proses dimana semua fungsi kegiatan lembaga harus diperlakukan sama, direncanakan, dikendalikan dan dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah.

Oakland (1993, 13) mendefinisikan jaminan kualitas adalah “jaminan kualitas secara luas yang mencegah masalah kualitas melalui kegiatan terencana dan sistematis. Ini akan mencakup pembentukan system manajemen mutu yang baik dan penilaian berkecukupan.

Artikel ini mencoba menggali dan menganalisis *quality assurance* dalam bidang pendidikan di dua negara serumpun, yang memiliki kemiripan kultur dan corak kehidupan yakni Indonesia dan Malaysia.

Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Penjaminan mutu adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistemik yang diperlukan untuk memberikan keyakinan (kepercayaan, kepastian, penjaminan) bahwa mutu hasil/ output (barang atau jasa) akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Fokus kegiatan penjaminan mutu adalah pada tingkat rencana (*upstream*) dan bukan pada output (*downstream*), sedang fokus pengendalian mutu terletak pada proses (implementasi). Evaluasi kinerja mutu terletak pada hasil/output. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 2 pada slide berikut.



Dalam bidang pendidikan, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistematis dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Permendiknas 63/2009).

Menurut Permendiknas 63/2009, tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Selain tujuan akhir, Permendiknas tersebut juga menuliskan “tujuan antara” penjaminan mutu pendidikan yaitu terbangunnya SPMP, yang mencakup: **(1)** terbangunnya budaya mutu

pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; **(2)** pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; **(3)** terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan; dan **(4)** terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

Mengenai Analisis terhadap Mutu Pendidikan terdapat dua sisi cara pandang, yaitu; **Pertama**, Mutu Pendidikan suatu negara selalu dibandingkan dengan Mutu Pendidikan negara lain / negara maju. Dalam hal ini, Mutu Pendidikan di Indonesia menjadi salah satu isu sentral di masyarakat. Dimana mutu pendidikannya secara umum masih dianggap rendah jika dibanding negara-negara lain. Dengan demikian, perlu dianalisa lebih lanjut data-data yang ada maka untuk menentukan kualitas Mutu Pendidikan dengan mengacu pada Standar Mutu Pendidikan Internasional. **Kedua**, Mutu Pendidikan satu negara dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan dan martabat bangsa. Sebagaimana dituangkan dalam UU. SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Tujuan Umum Pendidikan Nasional bahwa ; “Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Di Indonesia tentang penjaminan mutu diatur dalam PP No.19/2005 dan diperbaharu PP No.32 /2013 :

1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan
2. Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan

3. Penjaminan mutu dilakukan bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Indonesia dalam menetapkan Standar Mutu Pendidikan menggunakan Standar Nasional Pendidikan. Untuk menjamin standarisasi mutu pendidikan di Indonesia ini dibentuklah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang melakukan pengawasan dan penelitian akan pelaksanaan usaha dalam mencapai mutu pendidikan. Untuk mempermudah pelaksanaan dan pengawasan standarisasi Mutu Pendidikan ini diatur dalam 8 Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh BSNP. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan

Adapun Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan ini adalah ::

- a. standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu
- b. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- c. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional dan global

Terkait dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam perspektif manajemen pendidikan maka akan terdeskripsikan pada bagan berikut :

SNP	FUNGSI MANAJEMEN			
	Planning	Organizing	Actuating	Controlling
ISI	1	10	19	28
PROSES	2	11	20	29
KETENGAAN	3	11	21	30
PENGELOLAAN	4	13	22	31
PEMBIAYNAAN	5	14	23	32
PENILAIAN	6	15	24	33
SKL	7	16	25	34
SARPRAS	8	17	26	35
MURID & LING	9	18	27	36



Penjaminan mutu pendidikan di Malaysia

Pendidikan di Malaysia pada dasarnya banyak mengadopsi sistem dari negara Inggris hal ini dikarenakan dulunya Malaysia adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini menyebabkan negara Malaysia maju dari segi pendidikannya. Salah satu penyebabnya adalah negara Inggris sangat memperhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya. Berbeda dengan negara Indonesia yang bekas jajahan Belanda, karena Belanda hanya ingin mengeruk kekayaan negara jajahannya tanpa memberikan pendidikan yang intensif untuk negara jajahannya. Negara Malaysia memiliki keinginan kuat untuk menjadikan pendidikannya itu go international sebagai buktinya hal itu dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pelajaran Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.”

Pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai kemajuan dan perkembangan dalam merealisasikan matlummat kerajaan menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Terdapat periode pendidikan pada pasca merdeka yaitu era 1957-1970, era 1971-1990, era 1991-2000 dan era 2001-2010. Pada awal abad ke-21, beberapa perubahan dan perkembangan dalam Sistem Pendidikan Malaysia telah berlaku disebabkan oleh globalisasi, liberalisasi, dan perkembangan teknologi dan komunikasi. Ekspektasi Malaysia saat ini adalah untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan atau ketrampilan dalam menghadapi persaingan dengan negara lain. Hal ini yang menjadikan Malaysia berpikir untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan.

Bila mencermati Falsafah Dasar Pendidikan di Malaysia, hampir memiliki kesamaan dengan nilai-nilai tujuan pendidikan yang dijalankan diseluruh dunia. Namun Malaysia memiliki landasan filosofis yang bersasal dari identitas dirinya.

Hal ini didasarkan pada falsafah pendidikan Negara yang tertuang pada Akta Pendidikan 1996 bahwa :*“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, ruhani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.”* (Kulanz Saleh, 2009)

Ada espektasi yang kuat dari Pemerintah Malaysia untuk menyelenggarakan pendidikan yang integral, karena itu terdapat empat buah Undang-undang yang dinamakan dengan Akta, yaitu Akta Pendidikan (*Education Act 1996*), Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (*Private Higher Education Institutions Act 1996*); Akta Majelis Pendidikan Tinggi Negara 1996; serta Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996 (*The National Accreditation Board Act 1996*), sangat jelas bahwa kematangan konsep pendidikan yang diregulasikan Malaysia sangat kuat. Bila dicermati secara mendala, regulasi tersebut tidak pernah berubag, kendati mengalami pergantian kepemimpinan.

Kurikulum pendidikan ditetapkan oleh Kementrian Pelajaran Malaysia. Kurikulum sekolah di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah rendah Malaysia disebut dengan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dari data Kementrian Pelajaran Malaysia , KBSR mulai diujicobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah. Sejak tahun 1988, pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 masih dipergunakan. Revisi dilakukan pada tahun 2003, dimana mata pelajaran Sains menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris dan pada tahun 2005 penggunaan bahasa pengantar dengan Bahasa Inggris diperluas untuk mata pelajaran Sains dan Matematika.

Melihat data diatas, bisa dipastikan bahwa Kementerian Pelajaran Malaysia pada hakekatnya tidak mengubah kurikulum yang ada secara total namun melalui perbaikan-perbaikan pada sisi-sisi tertentu yang merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan

terdahulu dan juga melakukan penataan ulang akan mutu para pendidikannya.

Analisis Penjaminan Mutu Indonesia – Malaysia

1. Standar Mutu Pendidikan di Indonesia bisa dibilang sudah memiliki konsep yang bagus dan memiliki alat ukur yang jelas akan tetapi dalam implementasinya masih didapati kekurangan dalam banyak hal terkait dengan kecerdasan sumberdaya manusia dalam mencerna sebuah kebijakan pendidikan dan ketrampilan yang minim akan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Implementasi Standar Mutu Pendidikan di Malaysia juga mengalami banyak perbaikan disana-sini akan tetapi substansi daripada kurikulum yang tertuang dalam Akta Pendidikan 1996 tidak pernah berubah bahkan stabil mengacu prinsip standar pelajaran di Malaysia.
3. Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga pelaksana teknis di Indonesia lambat untuk berkembang.
4. Faktor lain yang berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di dua Negara serumpun adalah bekas jajahan, Malaysia jajahan Inggris, sedang Indonesia dijajah Belanda. Hal ini mempengaruhi system pendidikannya.

Daftar Pustaka

Abdul Rachman Assegaf (2003) Internasosialisasi Pendidikan : Sketsa Perbandingan Pendidikan di negara-negara Islam dan Barat, Gama Media, Yogyakarta

Kulanz. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia. (2009). <http://kulanzsalleh.com/sejarah-perkembangan-sistem-pendidikan-di-malaysia/> di akses pada 12-12-2013

Oakland (1993) *Total Quality management*, Oxfort : Butterworth-Heinemann

Slamet PH (2012), Handout mata kuliah Disentralisasi Pendidikan, MP S3, PPs UNY